



Kebijakan Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Kualitas, Kuantitas Efektivitas dan Efisiensi

Abd. Muiz¹, Rohmatul Anisah², Untung Khoiruddin³, Erwin Indrioko⁴

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia¹⁻⁴,

Email Korespondensi: abdmuiz459@gmail.com¹, rohani2607@gmail.com²,
untungkhoiruddin@gmail.com³, indriokoerwin@gmail.com⁴

Article received: 28 Juni 2024, Review process: 23 Juli 2024

Article Accepted: 10 September 2024, Article published: 01 Oktober 2024

ABSTRACT

Policies in education are crucial to ensure that education in Indonesia can develop thoroughly and sustainably. The purpose of this study is to analyze policy strategies to improve the overall condition of education. This research method uses Literature Review, Data is collected from various written sources, including articles, documents, and related literature, which are then analyzed to find effective strategies. The results show four main focuses: (1) curriculum development, teacher training, and school evaluation, which aim to improve the quality of teaching and learning, (2) increasing the accessibility of education through budget allocations, scholarships, and incentives, so that education can be accessed by all levels of society, (3) innovations in learning such as technology integration and project-based learning methods, which aim to make the teaching and learning process more relevant and interesting, (4) optimizing the efficiency of education with transparency, accountability, and the use of data, to ensure effective and efficient resource management. The implementation of this holistic policy is expected to be able to overcome various educational problems and form a competent generation to face the era of globalization, as well as encourage the progress of the nation as a whole

Keywords: Education policy, Quality, Quantity, Effectiveness, Efficiency.

ABSTRAK

Kebijakan dalam pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat berkembang secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi kebijakan untuk meningkatkan kondisi pendidikan secara menyeluruh. Metode penelitian ini menggunakan Review Literature, Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, termasuk artikel, dokumen, dan literatur terkait, yang kemudian dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan empat fokus utama: (1) pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan evaluasi sekolah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, (2) peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui alokasi anggaran, beasiswa, dan insentif, sehingga pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, (3) inovasi dalam pembelajaran seperti integrasi teknologi dan metode pembelajaran berbasis proyek, yang bertujuan untuk membuat proses belajar mengajar lebih relevan dan menarik, (4) optimalisasi efisiensi pendidikan dengan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan data, untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Implementasi

kebijakan holistik ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah pendidikan dan membentuk generasi yang kompeten untuk menghadapi era globalisasi, serta mendorong kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan, Kualitas, Kuantitas, Efektivitas, Efisiensi*

PENDAHULUAN

Mendidik merupakan tugas mulia untuk menggali, menumbuhkan, dan Persoalan kuantitas pendidikan terkait dengan jumlah murid yang harus ditampung dalam sistem pendidikan atau sekolah. Murid yang tidak tertampung akibat keterbatasan daya tampung sekolah memiliki peluang pendidikan yang terbatas, terutama di tingkat sekolah dasar. Menurut Dr. Zamroni, kualitas pendidikan umumnya diukur berdasarkan prestasi yang ditunjukkan dengan kemampuan siswa mencapai skor dalam tes dan kemampuan lulusan mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan. Namun, mengukur kualitas pendidikan merupakan hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas input dalam sistem pendidikan, kemajuan kehidupan manusia, kemajuan zaman, dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Oleh karena itu, kualitas pendidikan dapat dipahami sebagai suatu masalah yang menyangkut keahlian lulusan sekolah atau kepemilikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari murid sekolah. Contohnya, murid kelas 3 SD yang belum lancar membaca surat kabar dan lulusan sekolah jurusan yang belum memiliki keterampilan kerja.

Pendidikan merupakan salah satu kunci bagi kemajuan bangsa (Dian et al., 2023). Pendidikan sangat penting bagi manusia untuk berkembang (Usman et al., 2023). Pendidikan merupakan salah satu usaha meningkatkan kualitas hidup manusia (Saidin et al., 2023). Pendidikan dan kebijakan memiliki keterkaitan yang sangat erat (Getar et al., 2023). Pendidikan didalamnya banyak aktivitas yang berhubungan antara manusia dengan manusia (Hasan et al., 2023). Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia (Nidia & Iskandar, 2023). Pendidikan saat ini telah mengalami pemutakhiran (Indra & Syahrizal, 2023). Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas (Ardiansyah et al., 2023).

Pembangunan pendidikan di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, di antaranya menyediakan layanan pendidikan berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar dan jenjang selanjutnya, menurunkan angka buta aksara, dan mempersempit kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat. Selain itu, meningkatkan penguasaan dan pemahaman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) juga menjadi tantangan krusial. Kegagalan dalam mengatasi tantangan-tantangan ini akan berakibat fatal. Ketertinggalan dalam penguasaan dan pemahaman IPTEK akan melemahkan daya saing bangsa di tingkat internasional dan menghambat kemampuan untuk berkompetisi di dunia global (Mohammad Ali, 2010). Kondisi ini diperparah dengan sejarah panjang penjajahan bangsa Indonesia selama lebih dari 350 tahun. Hal ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat tidak memiliki

tingkat kecerdasan yang setara dengan bangsa-bangsa penjajah. Pada masa penjajahan, rendahnya taraf pendidikan, bahkan ketiadaan akses pendidikan bagi sebagian besar masyarakat, menyebabkan kehidupan yang memprihatinkan. Meskipun saat ini Indonesia telah menyediakan pendidikan bagi masyarakatnya, kualitas dan pemerataannya masih jauh dari ideal dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang berakibat pada penurunan kuantitas pendidikan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) mengidentifikasi tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; dan (3) sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan strategi baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. MBS memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola pendidikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas lulusan. MBS memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah. Sekolah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan strategi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Namun, sekolah juga harus bertanggung jawab atas hasil pendidikan yang dicapai.

Pemberian otonomi kepada sekolah melalui desentralisasi pengambilan keputusan diharapkan meningkatkan kemandirian sekolah dalam menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Sekolah harus mampu merancang program pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di era Society 5.0, pendidikan menjadi kunci untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan sosial yang semakin kompleks. Masyarakat perlu didorong untuk menjadi pembelajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dalam platform teknologi dan informasi. Pengembangan kurikulum secara global dengan memanfaatkan inovasi digital juga penting untuk memastikan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Kebijakan Pendidikan menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan untuk memahami permasalahan pendidikan dan menentukan arah yang harus ditempuh. Kebijakan ini juga menjadi payung hukum dan pedoman bagi seluruh penyelenggara pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode studi pustaka (*library research*). Pada metode ini, peneliti mengumpulkan teori sebanyak-banyaknya serta informasi dari bahan-bahan pustaka yang menyangkut tentang topik penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah referensi dari berbagai sumber mulai dari buku, artikel jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan jurnal ini. Referensi tersebut dikumpulkan kemudian dikaji secara seksama serta ditambah dengan tambahan pandangan dari peneliti terkait dengan apa yang ada dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dalam mengatasi masalah kualitas, kuantitas, Efektivitas dan Efisiensi, dapat peneliti dipaparkan sebagai berikut:

A. Pengertian Kebijakan

Kata “kebijakan” berasal dari bahasa Yunani “Polis” yang berarti kota. Dalam konteks ini, kebijakan mengacu pada gagasan pengaturan organisasi dan pola formal yang disepakati bersama oleh pemerintah atau lembaga. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama (Syafaruddin, 2001).

Menurut Abidin, kebijakan adalah ketetapan pemerintah yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Kebijakan ini berbentuk aturan tertulis yang mengikat dan bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan menjadi pedoman utama bagi anggota organisasi atau masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan umumnya bersifat proaktif dan berfokus pada solusi masalah (Dunn, William N., 2003). Dibandingkan dengan hukum (*Law*) dan peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih adaptif dan terbuka untuk interpretasi, meskipun tetap mengatur “apa yang boleh dan tidak boleh”. Kebijakan diharapkan bersifat umum namun tetap mempertimbangkan kekhasan lokal. Kebijakan harus memungkinkan interpretasi sesuai dengan kondisi spesifik yang ada.

Pemahaman keliru tentang kebijakan masih sering terjadi. Kebijaksanaan dan kebijakan sering disalahartikan sebagai hal yang sama, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki individu, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah : (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Menurut Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara. Carter V Good mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai pertimbangan yang berdasarkan sistem nilai dan penilaian terhadap faktor-faktor situasional. Pertimbangan ini menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang bersifat melembaga dan

merupakan perencanaan yang menjadi pedoman pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan erat kaitannya dengan kebijakan publik lainnya, seperti kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, dan agama. Hal ini berarti kebijakan pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dan dapat berubah seiring dengan perubahan kebijakan publik lainnya. Contohnya, perubahan kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri dapat memengaruhi perubahan kebijakan pendidikan. Bahkan, pergantian menteri pun dapat mengakibatkan perubahan kebijakan yang telah ada. Hal ini seperti yang terjadi pada pelajaran PSPB yang mirip dengan IPS Sejarah, namun kemudian dihapuskan dan diganti dengan materi lain.

B. Fungsi Kebijakan

Efektivitas kebijakan organisasi menjadi kunci dalam menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi. Kebijakan yang dijalankan dengan baik akan menunjukkan hasil dan manfaat yang nyata bagi organisasi. Hakikat kebijakan adalah keputusan yang memuat tujuan, prinsip, dan aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan dibuat melalui proses yang melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk lingkungan eksternal, masukan, proses transformasi, keluaran, dan umpan balik. Kebijakan memiliki peran penting sebagai pedoman bertindak, pembatas perilaku, dan bantuan bagi pengambil keputusan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

C. Arah Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia bertujuan untuk:

1. Mengembangkan potensi peserta didik: Membantu peserta didik mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan mereka secara optimal.
2. Membentuk watak dan peradaban bangsa: Menanamkan nilai-nilai luhur dan karakter mulia pada peserta didik, sehingga mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi bangsa.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa: Meningkatkan kualitas pendidikan bangsa agar menghasilkan generasi yang cerdas, terampil, dan berpengetahuan luas.
4. Memperluas dan pemeratakan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dengan meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan untuk melahirkan generasi unggul bangsa.
5. Memperkuat kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik melalui pengembangan kemampuan akademik, profesional, dan watak untuk

memulihkan wibawa lembaga pendidikan

D. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki ciri khas khusus yang membuatnya berbeda dari jenis kebijakan lainnya, yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk berkontribusi pada kemajuan pendidikan

2. Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan harus memenuhi persyaratan konstitusional yang berlaku di wilayah tertentu agar diakui dan sah secara hukum

3. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif

4. Dibuat oleh yang berwenang

Penyusunan kebijakan pendidikan harus melibatkan para ahli yang kompeten dan berwenang untuk meminimalisir dampak negatif pada pendidikan dan lingkungannya, dengan melibatkan administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan politisi terkait

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan harus fleksibel untuk memungkinkan evaluasi, adaptasi, dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pendidikan

6. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan harus dirancang dengan sistematika yang jelas, efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta terintegrasi dengan kebijakan lain untuk menghindari kelemahan struktural dan hukum, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan internal dan eksternal yang relevan.

E. Kualitas Pendidikan

Peningkatan perhatian terhadap sektor pendidikan akhir-akhir ini dilatarbelakangi oleh tantangan internal dan eksternal. Di ranah internal, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, dan putus sekolah. Sementara tantangan eksternal datang dari globalisasi yang menuntut kehadiran sumber daya manusia handal dengan daya saing tinggi. Sumber daya manusia ini tidak hanya unggul secara akademis dan keterampilan teknis, namun yang lebih penting adalah memiliki kompetensi keterampilan generik. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam aspek akses, kualitas, tata kelola, dan pembiayaan pendidikan. Selain itu, perlu penanganan terhadap akar penyebab rendahnya kualitas pendidikan, seperti kualitas dan distribusi guru yang belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum yang kurang sesuai, dan lingkungan belajar yang belum mendukung, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Banyak pihak berpendapat bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari berbagai indikator, seperti lulusan yang belum siap kerja, peringkat Human Development Index (HDI) yang rendah (posisi 110 dibawah Vietnam pada tahun 2005 dari 117 negara), kemampuan membaca siswa SD yang rendah menurut laporan International Educational Achievement (IEA) (peringkat 38 dari 39 negara), serta peringkat PISA 2003 yang menunjukkan pencapaian rendah di bidang IPA (38), Matematika (39), dan membaca (dibandingkan dengan peringkat tinggi Korea Selatan). Indikator lain adalah daya saing SDM Indonesia yang rendah menurut World Competitiveness Yearbook tahun 2000 (peringkat 46 dari 47 negara) dan posisi perguruan tinggi favorit Indonesia (Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada) yang berada di peringkat bawah di Asia (masing-masing peringkat 61 dan 68 dari 77 perguruan tinggi). Ketertinggalan Indonesia dalam bidang IPTEK dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand semakin memperkuat argumen ini. Meskipun ada kabar bahwa dua perguruan tinggi Indonesia (UI dan ITB) masuk peringkat 200 terbaik di Asia Pasifik, berbagai kekurangan mendasar seperti kualitas dan distribusi guru, infrastruktur dan sarana pendidikan, kurikulum, dan lingkungan belajar yang belum mendukung, perlu ditangani untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh (Fasli jalal, Dedi Supriadi, 2001).

Menurut Rodrigo Chaves, kepala perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, meskipun telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia, kualitas pendidikan masih menjadi isu yang serius. Hal ini tercermin dalam tingginya angka kasus buta huruf, di mana sekitar 55 persen dari anak usia 15 tahun di Indonesia mengalami kondisi fungsional buta huruf, sementara di Vietnam angka ini kurang dari 10 persen. Oleh karena itu, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, termasuk ketidakmerataan akses pendidikan yang masih terjadi. Chaves menekankan perlunya perluasan akses pendidikan yang lebih merata, sesuai dengan standar internasional baik dari segi kurikulum maupun implementasi praktiknya. Selain itu, ia juga menyarankan pemerintah untuk meningkatkan kriteria kualifikasi guru.

F. Kuantitas Pendidikan

Sejak era reformasi, fokus terhadap sektor pendidikan di Indonesia semakin intensif. Hal ini dibuktikan dengan komitmen negara melalui kebijakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Alokasi anggaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan membebaskan biaya pendidikan minimal pada tingkat pendidikan dasar. Komitmen ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Alokasi anggaran yang signifikan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan dibebaskannya biaya pendidikan dasar, diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan membuka peluang bagi generasi penerus bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun, perlu diingat bahwa komitmen negara terhadap pendidikan tidak hanya

sebatas pada alokasi anggaran. Masih banyak hal lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti peningkatan mutu guru, penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, swasta, dan organisasi non-pemerintah, untuk mencapai tujuan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang dan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing.

Meskipun statistik menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 7-12 tahun dari tahun ke tahun, ironisnya masih terdapat jutaan anak Indonesia yang putus sekolah. Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan tren kenaikan APS pada usia 7-12 tahun. Pada tahun 2015, APS mencapai 98,57%, dan terus meningkat hingga mencapai 99,11% di tahun 2018. Namun, di balik statistik positif tersebut, terdapat kenyataan pahit bahwa jutaan anak Indonesia masih belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan bahwa total 4.586.332 anak usia 7-18 tahun di Indonesia tidak bersekolah. Jumlah anak putus sekolah terbanyak terkonsentrasi di Jawa Barat, mencapai 958.599 anak. Disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan jumlah masing-masing 677.642 dan 609.131 anak. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, seperti meningkatkan akses pendidikan, memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam membantu anak-anak yang putus sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan motivasi dan dukungan kepada mereka untuk kembali melanjutkan pendidikan. Hanya dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, masalah anak putus sekolah di Indonesia dapat diatasi dan semua anak di Indonesia dapat mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Meskipun statistik menunjukkan tren positif berupa peningkatan partisipasi pendidikan dan jumlah sekolah, fokus utama kita harus beralih ke kualitas pendidikan. Data yang dihimpun TNP2K dan Kemendikbud sama-sama mengungkap peningkatan ini. Partisipasi pendidikan terus naik, dan pada tahun ajaran 2018/2019, angka partisipasi kasar jenjang pendidikan menengah mencapai 88,6%. Begitu pula, jumlah sekolah di berbagai provinsi mengalami kenaikan, dengan 216.066 sekolah berdiri pada tahun ajaran 2018/2019, naik 2% dari tahun ajaran sebelumnya. Namun, perlu diingat bahwa sekadar menambah jumlah peserta didik dan sekolah tidak menjamin kualitas pendidikan yang baik. Tantangan kita saat ini adalah memastikan peningkatan kualitas pendidikan agar Indonesia dapat bersaing secara global. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan perlu diterapkan. Ini bisa berupa peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengembangan kurikulum yang

relevan dengan kebutuhan zaman, hingga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Indonesia dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang tidak hanya memiliki akses pendidikan, tetapi juga siap bersaing dan menjadi pemimpin masa depan.

G. Efektivitas Pendidikan

1. Pengertian efektivitas pendidikan

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Efektivitas institusi pendidikan terdiri atas dimensi manajemen dan kepemimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan personal lainnya, siswa, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan kelas, hubungan sekolah dan masyarakat, pengelolaan bidang khusus lainnya, yang hasil nyatanya merujuk pada hasil yang diharapkan, bahkan menunjukkan kedekatan/kemiripan antara hasil nyata dan yang diharapkan (H. Sanusi Uwes & H.A. Rusdiana, 2017).

Efektivitas adalah kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ketika sesuatu dianggap efektif, itu berarti ia memiliki hasil yang diharapkan atau diharapkan, atau menghasilkan kesan yang mendalam dan jelas. Sondang p. siagian memberikan definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Sondang P. Siagian, 2001). Beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendidikan adalah tingkat keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga pendidikan.

Suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila memenuhi persyaratan utama keefektifan pengajaran, yaitu : (E. Mulyana, 2009).

- a) Presentase waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap KBM.
- b) Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi diantara siswa.
- c) Ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan siswa (orientasi keberhasilan belajar) diutamakan.
- d) Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif. Sedangkan menurut Tim Penyusun Didaktik
- e) Metodik kurikulum IKIP Surabaya, bahwa demi ketepatan dan keobjektivan di dalam pengamatan dan penilaian terhadap proses belajar mengajar seorang guru, maka perlu digunakan sebuah daftar pertimbangan dan penilaian efektivitas mengajar yang berisi 10 kriteria efektivitas mengajar yang perlu diperhatikan oleh para pengajar yaitu sebagai berikut: ⁵
 - 1) Persiapan: seperti peralatan mengajar dan buku pegangan.
 - 2) Sikap, gaya dan suara mengajar.
 - 3) Perumusan tujuan intruksional.

- 4) Bahan pelajaran.
- 5) Penguasaan bahan pelajaran.
- 6) Penguasaan situasi kelas.
- 7) Pilihan dan pelaksanaan metode mengajar.
- 8) Penggunaan alat-alat peraga pengajaran.
- 9) Jalan pengajaran.
- 10) Teknik evaluasi.

2. Kajian efektivitas pendidikan

Kajian terhadap efektivitas suatu usaha yang panjang dan berkesinambungan seperti pendidikan, membawa kita pada pertanyaan apa yang menjadi indikator efektivitas pada setiap tahapannya. Indikator-indikator efektivitas pendidikan tersebut yaitu: (E. Mulyana, 2009).

- a. Indikator *input*; indikator ini meliputi karakteristik guru, fasilitas, perlengkapan, dan materi pendidikan serta kapasitas manajemen.
- b. Indikator *process*; indikator proses meliputi perilaku administratif, alokasi waktu guru, dan alokasi waktu peserta didik.
- c. Indikator *ouput*; indikator ini berupa hasil-hasil dalam bentuk perolehan peserta didik dan dinamikanya sistem sekolah, hasil-hasil yang berhubungan dengan prestasi belajar, dan hasil-hasil yang berhubungan dengan prestasi belajar, dan hasil-hasil yang berhubungan dengan perubahan sikap, serta hasil-hasil yang berhubungan dengan keadilan dan kesamaan.
- d. Indikator *outcome*; indikator ini meliputi jumlah lulusan ke tingkat pendidikan berikutnya, prestasi belajar di sekolah yang lebih tinggi dan pekerjaan, serta pendapatan.

Pendidikan yang efektif akan terwujud jika didukung oleh komponen-komponen yang juga efektif. Komponen-komponen yang dimaksud adalah sekolah, kepala sekolah, guru, dan murid yang efektif. (Marjohan, 2009). Efektivitas organisasi termasuk organisasi layanan masyarakat, seperti lembaga pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

- a. Efektivitas keseluruhan, berhubungan dengan bagaimana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya.
- b. Kualitas, menyangkut jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi.
- c. Produktivitas, menyangkut volume produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi. Produktifitas dapat diukur dari tiga tingkatan, yaitu tingkat individu, kelompok dan keseluruhan organisasi.
- d. Kesiagaan, berhubungan dengan penilaian meenyeluruh tentang kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan suatu tugas khusus dengan baik jika diminta.
- e. Efisiensi, mencerminkan perbandingan beberapa aspek prestasi unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- f. Laba atau penghasilan, berkaitan dengan penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan organisasi dilihat dari sudut pandang si pemilik.

- g. Pertumbuhan, berkaitan dengan penambahan, seperti tenaga kerja, fasilitas, harta, penjualan, laba, bagian pasar, dan penemuan-penemuan baru. Pertumbuhan ini dilihat dari suatu perbandingan keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa lalu.
 - h. Pendayagunaan lingkungan, berkaitan dengan batas keberhasilan organisasi berinteraksi dengan lingkungannya, memperoleh sumber daya yang langka, dan berharga, yang diperlukan untuk efektivitas operasional. Hal ini dipandang dari rencana jangka panjang yang optimal bukan dalam rencana jangka pendek yang maksimal
 - i. Stabilitas, berkaitan dengan pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu, khususnya dalam periode-periode sulit.
 - j. Perputaran atau ke luar masuknya pekerja, menyangkut frekuensi atau jumlah pekerja yang ke luar atas permintaannya sendiri.
 - k. Semangat kerja, berkaitan dengan kecenderungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi, termasuk perasaan terikat. Semangat kerja adalah gejala kelompok yang mengakibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki (sense of belonging)
 - l. Motivasi, berkaitan dengan kekuatan kecenderungan seorang individu melibatkan diri dalam kegiatan dan bersedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.
 - m. Kepuasan, berkaitan dengan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi.
 - n. Penerimaan tujuan organisasi, berkaitan dengan diterimanya tujuan oleh setiap pribadi atau unit-unit dalam organisasi karena mereka percaya bahwa tujuan tersebut benar dan layak.
 - o. Keluwesan dan adaptasi, berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mengubah prosedur standar operasi jika lingkungan berubah, untuk mencegah kebekuan ransangan lingkungan.
 - p. Penilaian oleh pihak luar, menyangkut penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan, yakni pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan, kesetiaan, kepercayaan, dan kelompok, seperti pemasok, pelanggan, pemegang saham, para petugas, dan masyarakat umum.
3. Sekolah Efektif

Aam Komariyah Cepi Triatna mendefinisikan efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dicapai. Lebih lanjut dinyatakan bahwa sekolah efektif menunjukkan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Abin menegaskan bahwa efektivitas sekolah pada dasarnya menunjukkan tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai berupa *achievements* atau *observed outputs* dengan hasil yang diharapkan berupa *objectives, targets, intended outputs* sebagaimana telah ditetapkan. (Supardi, 2013). Dapat dikatakan bahwa sekolah efektif merupakan sejauh mana hasil yang dicapai dilihat dari tujuan yang

diharapkan atau lebih singkatnya yaitu kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan.

Sekolah yang efektif mempunyai standar indikator seperti yang digambarkan oleh Sergio Vanio, yaitu sekolah yang jika murid-muridnya dinilai setiap tahun oleh pihak yang independen, maka skor penilaiannya selalu meningkat. Tandanya murid-murid di sekolah itu sangat antusias dalam belajar dan antusiasme itu tercermin dalam peningkatan presentase kehadiran. Guru juga sangat konsekuen dalam memberikan pekerjaan rumah (PR) dan konsisten dalam menilainya. Program dan jadwal ekstrakurikuler di sekolah pun mendapat tanggapan yang hangat dari orang tua dan masyarakat. (Marjohan, 2009). Sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel dalam rangka pencapaian visi-misi-tujuan sekolah secara efektif dan efisien. (Supardi, 2013).

Edmons memberikan lima karakteristik sekolah efektif, yaitu: (1) kepala sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat (2) harapan yang tinggi terhadap prestasi pelajar (3) menekankan pada keterampilan dasar (4) keteraturan dan atmosfer terkendali (5) seringnya penilaian terhadap prestasi pelajar (Syafaruddin, 2001).

Menurut departemen pendidikan nasional (Dediknas), sekolah dikatakan baik apabila memiliki delapan kriteria (1) siswa yang masuk terseleksi dengan ketat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik, (2) sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran, (3) iklim dan suasana mendukung untuk kegiatan belajar, (4) guru dan tenaga kependidikan memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang memadai, (5) melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa yang pada umumnya memiliki motivasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya, (6) jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntutan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa, (7) proses pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa maupun wali siswa, dan (8) sekolah unggul bermanfaat bagi lingkungannya. (Supardi, 2013). Sekolah efektif juga menunjukkan lingkungan kerja profesional dengan pengembangan staf, perencanaan kolaboratif (bekerja sama), pengajaran unggul dan rendahnya tingkat berhenti sekolah, iklim sekolah efektif juga membagi sasaran dan tingginya harapan terhadap pelajaran (Syafaruddin, 2001).

Bursein, Lina, dan Capel menegaskan sekolah efektif mengandung dua dimensi yaitu kualitas dan ekuitas. Kualitas dimaksudkan sekolah dapat meningkatkan pencapaian akademik peserta didik manakala ekuitas dimaksudkan sekolah dapat menampung peserta didik dari kalangan keluarga miskin. Seterusnya beliau mengatakan sekolah efektif adalah sekolah yang dapat meningkatkan pencapaian akademik peserta didik yang tinggi

berbanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Manakala sekolah tidak efektif ialah sekolah yang pencapaian akademik peserta didiknya di bawah rata-rata pencapaian kebanyakan sekolah. (Supardi, 2013).

Apapun kebijakan sekolah yang berfokus pada kepentingan jangka panjang dan perubahan sekolah dapat dipastikan bermuara kepada sekolah efektif, sekolah yang berhasil, atau sekolah unggul. Kebijakan pengembangan sekolah dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah, manajemen peningkatan mutu atau manajemen kolaboratif sebagai pilihan kepala sekolah untuk mengarahkan perubahan sekolah yang diinginkan sesuai dengan sumber daya sekolah dan budaya sekolah. Di sini dipahami budaya sekolah adalah refleksi dari norma dan nilai dari warga sekolah (Syafaruddin, 2001). Lebih dari itu, sekolah efektif sangat menghargai waktu dan akan memanfaatkannya ibarat mendayagunakan uang. Tentu saja sebagian besar waktu itu digunakan untuk belajar. Guru-guru di sekolah yang efektif mampu melaksanakan proses belajar mengajar yang bebas dari gangguan dan memberikan pekerjaan rumah dengan cara bertanggungjawab. Sekolah ini memulai dan mengakhiri kegiatan belajar dengan tepat waktu (Marjohan, 2009).

Hoy dan Ferguson mengatakan sekolah efektif sepatutnya menghasilkan dalam jumlah besar peserta didik cemerlang dalam ujian, menggunakan sumber daya secara cermat, dapat menyelesaikan dengan baik tantangan baik tantangan internal dan eksternal, dan menghasilkan kepuasan yang baik di dalam sekolah. (Supardi, 2013). Beberapa uraian tentang sekolah efektif di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Sekolah efektif merupakan sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel dalam rangka pencapaian visi- misi-tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

H. Efisiensi Pendidikan

Efisiensi merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen sekolah karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber dana, dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Kalau efektivitas membandingkan antara rencana dengan tujuan yang dicapai, efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. (E. Mulyana, 2009). Pemanfaatan sumber dana secara optimal terhadap tercapainya tujuan merupakan maksud dari efisiensi tersebut.

Darma mengemukakan bahwa efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi juga merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya, serta kesenangan yang dihasilkan. (E. Mulyana, 2009).

Efisiensi berkaitan dengan cara membuat sesuatu dengan benar, sedangkan efektivitas berkaitan dengan tujuan. Dengan kata lain, efektivitas adalah perbandingan antara rencana dan tujuan yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih

ditekankan pada perbandingan input/ sumber daya dengan output. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Efisien pendidikan merupakan cara mencapai tujuan pendidikan dengan memerhatikan tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan sarana (H. Sanusi Uwes & H.A. Rusdiana, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Efisien merupakan pencapaian suatu tujuan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin.

I. Kebijakan Pendidikan Untuk Mengatasi Masalah Kualitas, Kuantitas, Efektivitas, dan Efisiensi

1. Kebijakan Pendidikan Untuk Mengatasi Masalah Kualitas

Untuk mengatasi masalah kualitas dalam sistem pendidikan, beberapa kebijakan yang dapat diterapkan termasuk:

- a. Peningkatan Kualifikasi Guru: Memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi yang memadai dan terus menerus melibatkan mereka dalam pelatihan profesional.
- b. Revisi Kurikulum: Meninjau dan memperbarui kurikulum untuk memastikan relevansi dan keterkaitannya dengan kebutuhan siswa serta kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan.
- c. Pengembangan Metode Pengajaran: Mendukung penggunaan metode pengajaran inovatif dan efektif untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
- d. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pendidikan: Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk mengukur kinerja sekolah, guru, dan siswa serta mengidentifikasi area perbaikan.
- e. Akses ke Sumber Belajar yang Berkualitas: Menjamin ketersediaan buku teks, materi pembelajaran, dan sumber daya pendukung pembelajaran yang berkualitas tinggi.
- f. Pemberdayaan Guru dan Staf Sekolah: Mendorong partisipasi guru dan staf sekolah dalam pengambilan keputusan dan memberikan dukungan yang memadai untuk meningkatkan kinerja mereka.
- g. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Melibatkan ahli pendidikan, peneliti, dan pihak eksternal lainnya untuk membawa perspektif dan praktik terbaik ke dalam sistem pendidikan.
- h. Fokus pada Pendidikan Inklusif: Menyediakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung keberagaman untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa.

2. Kebijakan Pendidikan Untuk Mengatasi Masalah Kuantitas

Untuk mengatasi masalah kuantitas dalam sistem pendidikan, beberapa kebijakan yang dapat diterapkan melibatkan aspek-aspek berikut:

- a. Ekspansi Akses Pendidikan: Memperluas dan meningkatkan akses terhadap fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang memiliki kesulitan dalam mencapai pendidikan.
- b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan: Membangun atau memperluas fasilitas pendidikan, seperti menambah kelas atau

memperbaiki infrastruktur sekolah, untuk menampung pertumbuhan jumlah siswa.

- c. Kebijakan Subsidi Pendidikan: Memberlakukan kebijakan subsidi atau bantuan finansial kepada keluarga dengan pendapatan rendah untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi hambatan.
- d. Program Beasiswa dan Pembiayaan: Menyediakan program beasiswa dan opsi pembiayaan pendidikan yang dapat membantu siswa mendapatkan akses pendidikan tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi.
- e. Promosi Pendidikan Anak Usia Dini: Mendorong partisipasi anak-anak dalam pendidikan sejak usia dini untuk membangun dasar pendidikan yang kuat.
- f. Program Pendidikan Jarak Jauh: Mengembangkan program pendidikan jarak jauh atau daring untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
- g. Kemitraan dengan Organisasi Non-Pemerintah: Berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperluas upaya akses pendidikan.
- h. Penyuluhan dan Kampanye Edukasi: Mengadakan program penyuluhan dan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan mendorong partisipasi.

3. Kebijakan Pendidikan Untuk Mengatasi Masalah Efektivitas

Untuk mengatasi masalah efektivitas dalam sistem pendidikan, beberapa kebijakan yang dapat diterapkan melibatkan strategi-strategi berikut:

- a. Peningkatan Kualifikasi Guru: Memberikan pelatihan yang kontinu dan mendalam kepada guru untuk meningkatkan keterampilan pengajaran dan kemampuan mereka dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif.
- b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Guru: Melakukan evaluasi teratur terhadap kinerja guru untuk memberikan umpan balik konstruktif dan mengidentifikasi area perbaikan.
- c. Pengembangan Kurikulum yang Relevan: Memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan zaman dan mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan.
- d. Pemanfaatan Teknologi Pendidikan: Mengintegrasikan teknologi pendidikan yang inovatif untuk meningkatkan interaksi, keterlibatan siswa, dan efektivitas pembelajaran.
- e. Pendidikan Berbasis Proyek: Menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan praktis dan pemahaman konsep secara mendalam.
- f. Pemantauan Proses Pembelajaran: Memantau secara rutin proses pembelajaran di kelas untuk menilai keefektifan metode pengajaran dan memastikan pemahaman siswa.
- g. Pendidikan Inklusif: Menyediakan lingkungan pendidikan yang inklusif untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

-
- h. Pemberdayaan Siswa: Mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, mengajarkan keterampilan belajar mandiri, dan membimbing mereka dalam pengembangan potensi pribadi.
 - i. Program Peningkatan Kualitas Sekolah: Melibatkan sekolah dalam program-program peningkatan kualitas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran.
 - j. Pengembangan Model Pembelajaran Kolaboratif: Mendorong kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan model pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan.

4. Kebijakan Pendidikan Untuk Mengatasi Masalah Efisiensi

Untuk mengatasi masalah efisiensi dalam sistem pendidikan, beberapa kebijakan yang dapat diimplementasikan melibatkan:

- a. Manajemen Sumber Daya yang Efisien: Mengelola sumber daya dengan efisien, termasuk alokasi dana, tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan.
- b. Optimasi Penggunaan Teknologi: Mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi, pelaporan, dan pengelolaan data pendidikan.
- c. Pembagian Waktu yang Efisien: Memastikan penggunaan waktu pembelajaran yang efisien, termasuk mengevaluasi jadwal pelajaran dan memaksimalkan waktu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
- d. Kolaborasi Antara Sekolah dan Pusat Pendidikan: Membangun kerja sama yang erat antara sekolah dengan pusat pendidikan atau kantor pendidikan daerah untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi operasional.
- e. Peningkatan Proses Administratif: Menyederhanakan proses administratif, termasuk pengurangan birokrasi yang tidak perlu, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah.
- f. Penggunaan Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja terhadap semua aspek sistem pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, dan staf administratif, untuk mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan.
- g. Peningkatan Pelatihan dan Pengembangan Karyawan: Memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi staf pendidikan.
- h. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Daring: Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan daring untuk memberikan opsi pembelajaran yang lebih fleksibel dan efisien.
- i. Alokasi Dana yang Strategis: Mengalokasikan dana pendidikan secara strategis, fokus pada program-program yang memberikan dampak terbesar terhadap kualitas pendidikan.
- j. Implementasi Kebijakan Penghematan Energi: Memperkenalkan kebijakan dan praktik yang berfokus pada penghematan energi, baik dalam hal penggunaan listrik maupun sumber daya lainnya

SIMPULAN

Kesimpulan dari artikel yang berjudul "Kebijakan Pendidikan untuk Mengatasi Masalah Kualitas, Kuantitas, Efektivitas, dan Efisiensi" menyoroti upaya yang perlu dilakukan dalam sistem pendidikan untuk menghadapi tantangan terkait aspek kualitas, kuantitas, efektivitas, dan efisiensi. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, perlu adanya peningkatan kurikulum, pengembangan metode pengajaran yang inovatif, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Terkait kuantitas, artikel ini menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Kebijakan pendidikan juga perlu memastikan bahwa semua anak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dalam mencapai efektivitas, artikel menyoroti perlunya evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap sistem pendidikan. Hal ini melibatkan pemantauan kinerja siswa, guru, dan lembaga pendidikan secara berkelanjutan guna menyesuaikan strategi yang efektif. Efisiensi juga menjadi fokus, dengan mendukung penggunaan sumber daya secara optimal. Peningkatan manajemen pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi, dan alokasi anggaran yang tepat menjadi aspek kunci untuk mencapai efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Allah SWT, kepada nabi Muhammad SAW, orang tua dan tentunya untuk Kampus kita tercinta, IAIN Kediri. Terimakasih untuk dosen pengampu dan partner penelitian yang sudah menyelesaikan artikel ini dan juga kepada semua pihak yang ikut mensukseskan penelitian sehingga bisa di sebarakan kepada khalayak umum dan bisa dijadikan sebagai rujukan terkait dengan kebijakan dalam pendidikan. Tentunya juga tidak lupa untuk IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam yang sudah mewadahi kami untuk berkarya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. (1987). *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta : Media Sarana Press
- Arcana, I. N., Dantes, N., & Marhaeni, A. A. I. N. (2015). Studi Evaluatif Tentang Kualitas Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Di Sd Gugus Inti Kecamatan Abang,
- Aslam, H. D. (2013). School-Based Management in Oman: Principals's Views and Understanding. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 2(3), <https://doi.org/10.6007/ijarped/v2-i3/2>
- Aulia Alfirzan,dkk.2021. *Kebijakan Pendidikan, Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Padang: Jurnal Pendidikan Tambusai
- Ardiansyah, Maisah, & Lukman, H. (2023). Analisis SWOT dan Pemetaan Strategi Lembaga Pendidikan Islam (Studi di SMAN 1 Bungo Provinsi Jambi). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 39–58.
- Batubara, H. H., & Arian, D. N. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di Sdn Sungai Miai 5 Dan Sdn Surgi Mufti 4 Di Banjarmasin, 3,

- Biltagy, M. (2013). Quality of Education, Earnings and Demand Function for Schooling in Egypt: An Economic Analysis. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 69(Iceepsy 2012), <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.123>
- Caldwell, B. J. (2005). *Management*. Paris: The International Institute for Educational Planning (IIEP).
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta. Gajah Mada University Press
- Dian, K., Maisah, & Lukman, H. (2023). Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Standar Operasional Pendidikan (Studi di MTsN 3 Tulungagung, Jambi). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 83-98.
- E. Mulyasa, 2009 *Manajemen Berbasis Sekolah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Fasli jalal, Dedi Supriadi. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Getar, R. P., Su'aidi, & Minnah, E. W. (2023). Meramalkan Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Memperkuat Penanaman Nilai-Nilai Islam Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 59-70.
- H.A.R. Tilaar. 2004. Paradigma Baru Pendidikan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.Yuningsih, 2015. *Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru*, UIN Bandung: Jurnal Pendidikan Islam
- Hamid, H. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah. *Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan*
- Hasbullah, 2015. *Kebijakan Pendidikan dalam perspektif teori, Aplikasi dan Kondisi obyektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres
- Hasan, S., Iskandar, & Martinis, Y. (2023). Perspektif Psikologi Pendidikan Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 1-9.
- Indra, W. F. F., & Syahrizal, H. (2023). Digitalisasi Lembaga Pendidikan dalam Menghadapi Perkembangan dan Kemajuan Teknologi Informasi Dunia Pendidikan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 26-38.
- Ihsan; Djailani; AR; Sakdiah Ibrahim. (2014). Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 62 Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(2).
- Kiragu, J. W., King'oina, J. O., & Migosi, J. A. (2013). School-based management prospects and challenges: A case of public secondary schools in murang'a south district. *International Journal of Asian Social Science*, 3(5), Retrieved from <http://www.aessweb.com/journal-detail.php?id=5007>
- Kunandar. 2007. Guru Profesional, Implementasi KTSP dan persiapan menghadapi sertifikat Guru, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marjohan, 2009, *School Healing Menyembuhkan Problem Sekolah*, Pustaka Insan Madani, yogyakarta.
- Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 1(1), <https://doi.org/10.24256/jpmipa.v1i1.86>
- Nidia, S., & Iskandar. (2023). Kontribusi Psikologi Dalam Manajemen Pengelolaan

Kelas. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 18–25.

Saidin, Maisah, & Lukman, H. (2023). Urgensi Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 10–17.

Sunaryo Kartadinata. 2019. Pendidikan Generasi Milenial, anonim

Supardi, 2013, *Sekolah Efektif Konsep Dasar & Praktiknya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Syafaruddin, 2008, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, PT Rineka Cipta, jakarta

Usman, F., Dwi, G. A. P., M.Fadhil, & M.Yudha. (2023). Strategi Guru Al-Qur'an Hadist Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di MTS Qiro'atul Qur'an Sungai Binjai. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 9–23.